

From Policy to Action: Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Pamekasan

Denny Iswanto^{1*)}

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 60197, Indonesia

***)Corresponding Author:** dennyiswant@gmail.com

[Accepted 03-06-2025; Revision 04-07-2025; Published 29-08-2025]

Abstract

Pamekasan Regency, as a coastal area in East Java Province, has great potential in the fisheries sector, especially in salt production. However, this sector often faces challenges, such as low income and minimal welfare of smallholder salt farmers. To overcome this problem, the Pamekasan Regency Government implemented a policy of empowering smallholder salt businesses (PUGAR). This study aims to analyze the implementation of the PUGAR policy in Pamekasan Regency. With a qualitative approach, data was obtained through primary data in the form of interview results and secondary data analysis. The results of the analysis show that this program involves 167 salt farmer groups with a focus on empowerment through increasing the capacity of salt farmers' human resources through appropriate technology to increase the effectiveness and efficiency of smallholder salt production. In addition, this program facilitates access to financing for farmers and has seen an increase in public facilities at several points, including the construction of production roads, irrigation channels, smallholder salt warehouses, and salt integration land. However, several problems still exist, such as the lack of understanding of human resources related to appropriate technology and institutional disagreements in all smallholder salt business groups. As a recommendation, further training is needed related to the use of appropriate technology and institutional improvements to ensure the long-term success of this program.

Keywords: Policy Implementation, Empowerment, Salt Farmer, Pugar, Rural Development

Abstrak

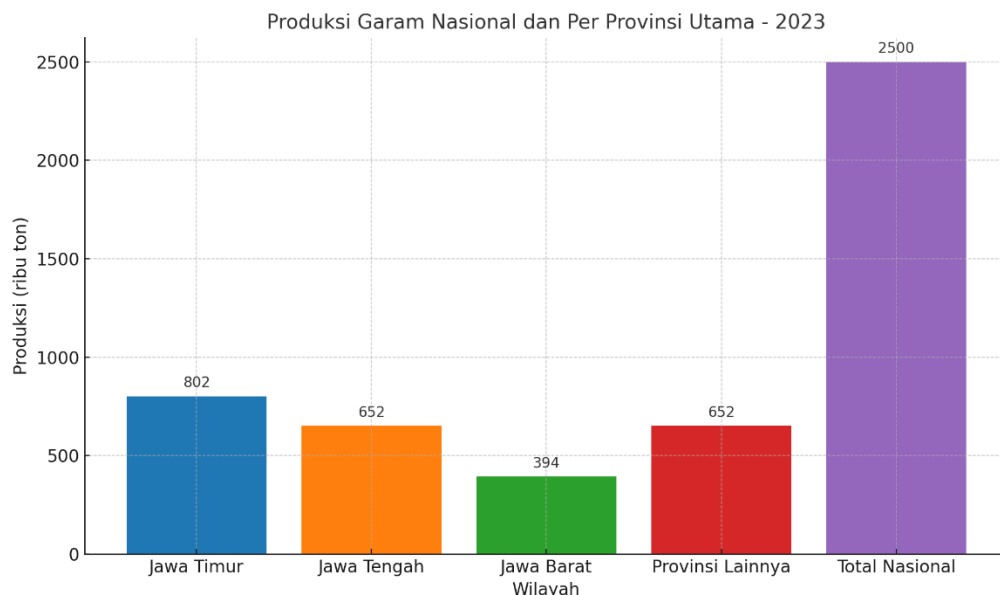
Kabupaten Pamekasan, sebagai wilayah pesisir di Provinsi Jawa Timur, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, terutama dalam produksi garam. Namun, sektor ini sering menghadapi tantangan, seperti pendapatan rendah dan kesejahteraan petani garam rakyat yang minim. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menerapkan kebijakan pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan PUGAR di Kabupaten Pamekasan. Dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui data primer berupa hasil wawancara dan analisis data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa program ini melibatkan 167 kelompok petani garam dengan fokus pada pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas SDM petani garam melalui teknologi tepat guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi garam rakyat. Selain itu, program ini mempermudah akses pembiayaan bagi petani dan telah melihat peningkatan fasilitas publik di sejumlah titik, termasuk pembangunan jalan produksi, saluran irigasi, gudang garam rakyat, dan lahan integrasi garam. Namun, beberapa masalah masih ada, seperti kurangnya pemahaman SDM terkait teknologi tepat guna dan ketidaksepakatan kelembagaan di semua kelompok usaha garam rakyat. Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan pelatihan lanjutan terkait penggunaan teknologi tepat guna dan penyempurnaan kelembagaan untuk memastikan kesuksesan jangka panjang dari program ini.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan, Petani Garam, Pugar, Pembangunan Pedesaan

Pendahuluan

Potensi sektor pertanian garam di Indonesia sebagai komoditas strategis perdagangan telah teridentifikasi sejak masa pra-kolonialisme oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), mencerminkan relevansi dan kontinuitas Keberlanjutan peran krusialnya dalam struktur ekonomi dan perdagangan Indonesia (Rochwulaningsih, 2007). Berbagai kebijakan dikeluarkan pada masa VOC berkuasa berupa sistem penyerahan wajib dan monopoli sektor pertanian garam terutama di Wilayah Jawa, Madura dan Lampung sejak tahun 1882 (Knaap, 1991).

Sebagian besar wilayah penghasil garam di Indonesia masih menggunakan cara tradisional dengan hanya memanfaatkan cahaya matahari untuk proses penguapan (Sari, 2018). Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa lusa lahan tambak garam produktif di Indonesia mencapai 30,768 hektar dan terletak di berbagai Kawasan, salah satunya yang terbesar adalah di Pulau Madura (Permodo & Rochwulaningsih, 2022). Berdasarkan data, produksi garam di Indonesia adalah sebesar 2.500 ton pada 2023.



Gambar 1. Produksi garam nasional dan per provinsi utama-2023

Sumber: Katherin (2024)

Data di atas menunjukkan bahwa produksi garam nasional Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,5 juta ton, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 1,7 juta ton. Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan penguatan produksi garam nasional, khususnya yang bersumber dari petani garam rakyat yang menyumbang sekitar 88% dari total produksi. Secara geografis, produksi garam masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, di mana Jawa Timur menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar, yaitu 802 ribu ton atau sekitar 32% dari total produksi nasional. Disusul oleh Jawa Tengah dengan 652 ribu ton (26%) dan Jawa Barat sebesar 394 ribu ton (16%). Sementara itu, provinsi-provinsi lainnya secara kolektif menyumbang sekitar 652 ribu ton atau 26% dari total produksi. Ketimpangan distribusi produksi ini menunjukkan bahwa potensi wilayah di luar Jawa belum tergarap secara optimal.

Madura merupakan salah satu daerah penghasil garam terbesar di Jawa Timur, dimana lahan garam di pulau Madura seluas 5.379 KM ini menguasai sekitar 30 persen lahan tambak nasional (Kuncoro et al., 2023). Produksi garam Madura ikut menyumbang sekitar 35 persen (600 ribu ton) dari total produksi garam nasional. Produksi garam di Madura bahkan dikenal sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara (Husein et al., 2022). Pamekasan sebagai salah satu daerah di Pulau Madura dengan produksi garam terbaik, mengalami berbagai tantangan yaitu petani garam belum mampu membangun jejaring kerja yang kuat (Gazali, 2019). Salah satu penyebab kendala tersebut masih terjadi adalah dikarenakan petani garam masih meminjam uang ke pedagang yang digunakan untuk modal produksi dengan sistem ijon, yakni dengan pedagang memberikan syarat kepada petani garam dimana hasil garam yang akan mereka jual harganya ditentukan langsung oleh pedagang (Nugroho et al., 2020).

Salah satu program untuk menangani masalah ini adalah melalui Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Per 41/MEN/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan. PUGAR adalah salah satu bentuk implementasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) dimana salah satu kegiatannya berupa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, khususnya untuk petani garam (Rintiyani et al., 2022). Program ini difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam yang pelaksanaannya dengan prinsip *bottom up*. Pendekatan *bottom up* adalah memberikan keleluasaan dan kebebasan masyarakat desa dalam menentukan berbagai program yang dibutuhkannya (Iswanto, 2021). Artinya, petani garam yang merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi kegiatan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.

PUGAR di Kabupaten Pamekasan diimplementasikan di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pademawu, Kecamatan Tlanakan serta Kecamatan Galis (Hanik & Mutmainah, 2020). Pengelompokan masyarakat petani garam pada program PUGAR biasa disebut dengan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Dibandingkan dengan daerah lain seperti Indramayu di Jawa Barat yang juga dikenal sebagai sentra penerapan PUGAR sejak 2011 dan membentuk puluhan KUGAR dengan produktivitas mencapai rata-rata 90 ton/ha serta peningkatan pendapatan signifikan (Heliana et al., 2024). Sementara itu, di wilayah timur seperti Kupang, tantangan geografis dan terbatasnya akses teknologi menjadi hambatan utama dalam optimalisasi program (Wanta, et al., 2023). Sebaliknya, di Pamekasan, PUGAR telah membentuk jejaring kelembagaan yang cukup solid melalui KUGAR dan menunjukkan pola kolaborasi yang relatif kuat antara pemerintah, petani, dan mitra pendukung lainnya. Selain itu, Madura secara umum, termasuk Pamekasan, merupakan wilayah strategis dalam peta produksi garam nasional, yang secara historis memiliki budaya dan kearifan lokal yang erat kaitannya dengan kegiatan produksi garam (Syakatera & Purnomo, 2022). Oleh karena itu, memilih Pamekasan sebagai lokasi penelitian menjadi relevan dan strategis untuk memahami bagaimana program PUGAR mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan petani garam secara lebih mendalam dibandingkan wilayah lainnya.

Tabel 1. Perkembangan jumlah KUGAR di Kabupaten Pamekasan

Tahun	Jumlah KUGAR
2011	123
2012	155
2013	160
2014	160
2015	170
2016	170
2017	164
2018	164

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pamekasan (2019)

Tabel diatas menunjukkan perkembangan jumlah KUGAR di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2011 jumlah kelompok di Kabupaten Pamekasan sebanyak 123 kelompok dan pada tahun 2012 jumlah kelompoknya bertambah menjadi 155 kelompok. Tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan jumlah menjadi 160 dan di tahun 2015 sampai 2016 terjadi peningkatan jumlah KUGAR menjadi 170. Hingga 2017 dan 2018 jumlahnya berkurang menjadi 165 dan hingga 2022 jumlah KUGAR berada di angka 167 kelompok.

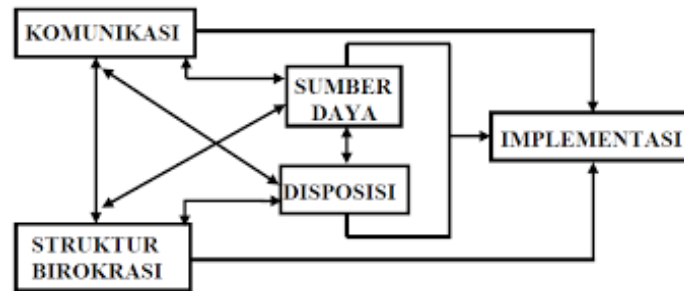
Menghadapi masa depan, Pamekasan perlu merencanakan pengembangan garam rakyat sebagai sumber bahan baku untuk industri, sektor perminyakan, farmasi, dan kebutuhan pangan masyarakat di seluruh Indonesia (Fauzan et al., 2020). Pentingnya garam rakyat juga terletak pada potensinya untuk mengurangi ketergantungan pada impor garam untuk kebutuhan industri. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi, termasuk mengaktifkan kembali lahan-lahan pergaraman yang tidak dimanfaatkan, memberdayakan para petani untuk meningkatkan posisi tawar mereka, serta meningkatkan teknologi pengolahan garam guna meningkatkan kualitas produksi garam dari petani maupun industri.

Tinjauan Pustaka

Kerangka Teori Implementasi Kebijakan

Analisis implementasi kebijakan PUGAR dalam laporan ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III. Model ini mengidentifikasi empat variabel kunci yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

George C Edward III menggambarkan model implementasi kebijakan dengan menunjuk empat variable yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.



Gambar 1. Model implementasi kebijakan Edward III

Sumber: Edward III (2024)

Model Edward III ini tidak hanya berfungsi sebagai alat deskriptif, melainkan sebagai kerangka diagnostik.

1. Komunikasi, yang menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila komunikasi dijalankan secara efektif antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran (*target group*). Menurut Agustino dalam Mursalim (2017) menyatakan bahwa komunikasi adalah salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik dan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.
2. Sumber daya, yakni menunjuk pada setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan berkecukupan dalam sumber daya finansial. Kedua hal ini menjadi penting dalam implementasi kebijakan untuk dapat menajalankan suatu kebijakan.
3. Disposisi, yaitu menunjuk pada karakteristik yang dimiliki implementor kebijakan. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.
4. Struktur Birokrasi, menunjuk pada mekanisme dan struktur organisasi. struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Semua saling bersinergi dalam mencapai tujuan.

Setiap variabel yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, merepresentasikan titik potensial kegagalan atau keberhasilan dalam proses implementasi. Dengan menggunakan kerangka ini, analisis dapat melampaui sekadar deskripsi tentang apa yang terjadi, untuk menjelaskan mengapa hasil-hasil tertentu tercapai, dengan mengaitkannya pada kekuatan atau kelemahan dalam keempat area tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang efektivitas kebijakan, melampaui ukuran output yang sederhana.

Metodologi

Partisipan

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pamekasan, Pulau Madura, Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi garam terbesar di Indonesia. Fokus wilayah penelitian mencakup tiga kecamatan utama tempat implementasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), yaitu Kecamatan Pademawu, Tlanakan, dan Galis.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Petani garam yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi garam rakyat.
- b. Anggota Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang menjadi bagian dari penerima manfaat program.
- c. Pemangku kepentingan institusional, dari Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pelaksana kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi PUGAR. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani garam, anggota KUGAR, pedagang garam, serta pejabat terkait, yang bertujuan untuk menggali secara rinci pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Selain itu, observasi langsung di lapangan dilakukan, terutama pada lahan tambak garam, untuk mengamati proses produksi, pola kerja petani, serta interaksi kelembagaan yang terjadi. Penelitian ini juga menggunakan survei dengan kuesioner tertutup dan terbuka yang disebarkan kepada petani dan anggota KUGAR sebagai instrumen pengumpulan data kuantitatif pelengkap. Di samping itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain dokumen kebijakan seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar hukum program PUGAR, laporan kegiatan dan evaluasi program yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan, serta data statistik terkait produksi dan distribusi garam yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Integrasi antara data primer dan sekunder ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan valid terhadap implementasi kebijakan pemberdayaan usaha garam rakyat di wilayah penelitian.

Analisis

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Wawancara dan observasi dianalisis dengan teknik tematik untuk mengidentifikasi pola-pola penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan dampak kebijakan PUGAR. Hasil survei dianalisis secara deskriptif untuk memperkuat temuan kualitatif. Seluruh data dari berbagai sumber kemudian diintegrasikan untuk memberikan gambaran holistik mengenai implementasi kebijakan PUGAR di Kabupaten Pamekasan, baik dari sisi manfaat maupun tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha garam rakyat.

Hasil

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan adalah melalui Program PUGAR. Program PUGAR berdiri pada tahun 2011 dengan titik berat sebagai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk memutus mata rantai tengkulak. Program PUGAR dimulai dari pembentukan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang ditujukan untuk mengorganisir pelaku kegiatan produksi garam, sehingga dapat mengurangi kelemahan yang terdapat pada petambak garam baik secara individual maupun kelompok. Selain itu KUGAR juga dibentuk agar memudahkan pemerintah dalam mengatasi keterbatasan akses, kurangnya modal, keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Dalam pembahasan ini akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang melihat kebijakan melalui empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Mubarok et al., 2020).

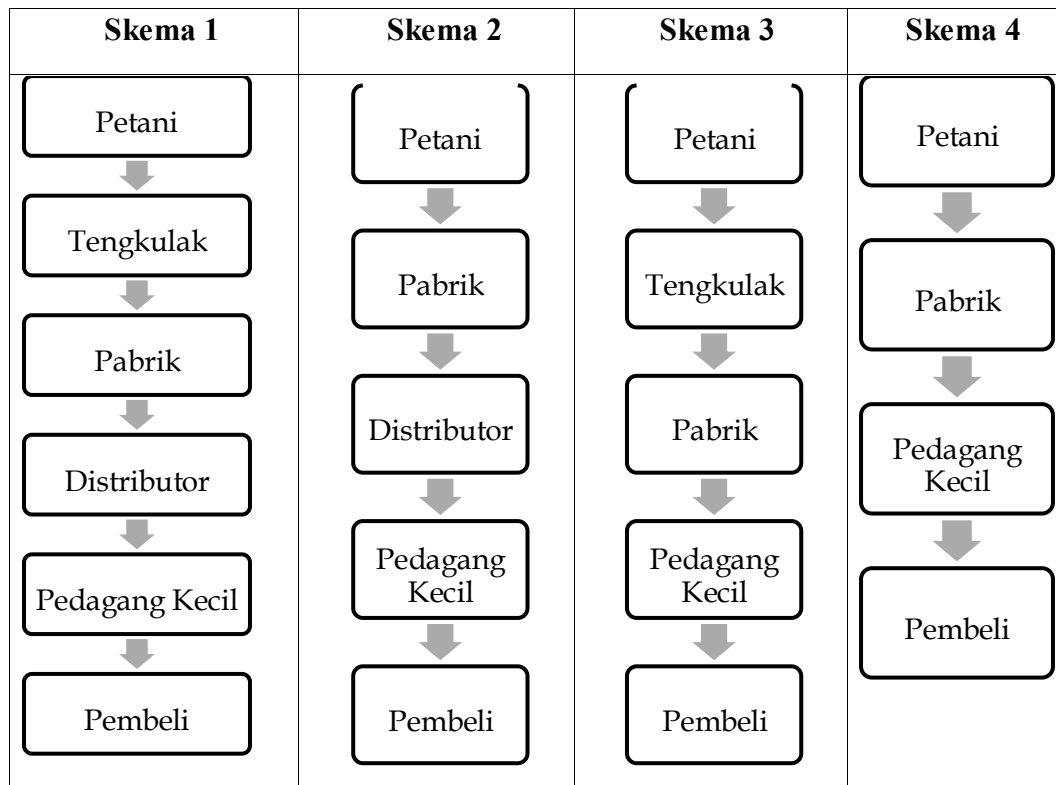
Komunikasi

Hubungan implementor program PUGAR dengan pihak yang terkait dengan program, utamanya pihak dinas terkait yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan dan petambak garam telah berlangsung dengan baik. Adapun cara untuk membina komunikasi tersebut yaitu melalui sosialisasi dan pemberdayaan langsung kepada petambak garam, pertemuan desa dan sharing baik yang dilaksanakan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan guna mendiskusikan perkembangan pelaksanaan program PUGAR.

Komunikasi petani tambak garam di Kabupaten Pamekasan adalah dilakukan dengan cara mendistribusikan produk yang telah dihasilkan, karena distribusi menjadi bagian penting dalam proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen akhir, sebaik apapun produknya, tanpa distribusi yang baik tidak mungkin produk tersebut dapat sampai pada konsumen akhir dengan tepat (Susandini & Jannah, 2021). Kegiatan untuk menyalurkan barang (produk) dapat dilakukan dengan cara langsung dari produsen kepada konsumen, akan tetapi dapat pula secara tidak langsung. Penyaluran tidak langsung berarti harus menggunakan penyalur atau distributor, sedangkan penyaluran langsung berarti tidak diperlukan adanya penyalur atau distributor. Semua itu merupakan tugas untuk mendistribusikan barangnya kepada konsumen. Untuk keperluan tersebut pengusaha dapat menggunakan berbagai bentuk saluran distribusi yang mungkin dilakukannya. Di Kabupaten Pamekasan sendiri bentuk saluran distribusi yang digunakan adalah distribusi langsung dan tidak langsung.

Bentuk saluran distribusi langsung adalah bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana yaitu saluran distribusi dari produsen ke konsumen, tanpa menggunakan perantara. Petani tambak garam di Kabupaten Pamekasan yang bisa memakai bentuk saluran distribusi langsung ini hanya sebagian kecil, mereka adalah para petani garam yang mempunyai modal besar untuk biaya transportasi dan sudah mempunyai pelanggan. Kedua adalah distribusi tidak langsung. Saluran distribusi tidak langsung adalah bentuk saluran distribusi yang pada umumnya digunakan petani tambak di Kabupaten Pamekasan, dalam bentuk saluran distribusi ini para petani (produsen

garam) membutuhkan perantara seperti: tengkulak, pengepul pabrik dan pedagang kecil untuk menjual produknya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk saluran distribusi tidak langsung yang ada di Kabupaten Pamekasan.



Gambar 3. Distribusi tidak langsung komoditas garam

Sumber: Wismanu et al. (2023)

Pada bentuk saluran distribusi yang pertama, petani garam menjual hasil produksi garam dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan penjualan garam pada bentuk distribusi yang lebih sederhana, sehingga para petani dalam bentuk distribusi yang pertama ini menggunakan jasa tengkulak sebelum sampai ke tangan pengepul pabrik. Bentuk saluran distribusi kedua memiliki kesamaan dengan saluran pertama namun pada skema ini tidak terdapat peran tengkulak sebagai perantara antara petani garam dengan pabrik. Petani garam di skema ini tidak memerlukan jasa tengkulak dikarenakan petani garam telah memiliki informasi perkembangan harga garam sehingga bisa langsung mendistribusikannya kepada pengepul pabrik.

Pada bentuk saluran distribusi ketiga, petani garam di Kabupaten Pamekasan menjual hasil pembuatan garam kepada tengkulak yang ada di Kabupaten Pamekasan, secara personal tengkulak yang menampung hasil garam dikenal baik oleh petani di wilayah Kabupaten Pamekasan. Pada skema distribusi keempat, petani langsung mendistribusikan hasil produksinya kepada pengepul pabrik tanpa harus melewati kesepakatan harga yang ditentukan tengkulak secara sepihak. Pada kondisi ini, petani garam memiliki akses informasi terhadap harga pasar garam. Setelah diproses pabrik, garam selanjutnya langsung didistribusikan kepada pedagang kecil sehingga kenaikan harga tidak terlalu mengalami kelonjakan. Pedagang kecil juga mendapat keuntungan pada skema ini dimana langsung mendapatkan hasil produksi pabrik. Selanjutnya, pedagang kecil mendistribusikan stok garam tersebut kepada pembeli sebagai tangan

terakhir rantai distribusi garam.

Sumber Daya

Program PUGAR dalam meningkatkan produksi garam melalui kualitas sumber daya yang dimiliki baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Pertama, pada aspek SDM terdapat beberapa kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani tambak melalui pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Pengenalan dan pelatihan teknologi Geomembran dan Teknologi Ulir Filter (TUF) pada tahun 2014 yang ditujukan untuk meningkatkan produksi garam. Dengan berjalannya pelatihan dilakukan para petani menerima dan mengimplementasikan dan telah mendapatkan manfaatnya.
- b. Pengenalan dan pelatihan konsep corporate dan integrasi lahan pada tahun 2016. Konsep *corporate* yaitu dengan merombak keseluruhan lahan dan menggunakan standar yang ada. Sedangkan konsep integrasi lahan yaitu dengan menggunakan 1 manajemen air dengan minimal lahan 15 Ha. Sejak tahun 2017 mulai di terapkan Corporate lahan di seluruh lahan tambak di Kabupaten Pamekasan.
- c. Pelatihan re-kristalisasi garam yang merupakan kerjasama dengan BPSDM pada tahun 2017. Garam yang diproduksi dari hasil re-kristalisasi tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000/kg dari harga awal Rp 400/kg. Biaya yang diperlukan untuk proses re-kristalisasi tersebut Rp. 1.000/kg. Pelatihan ini dianggap berhasil karena dapat meningkatkan produksi garam dengan cara re-kristalisasi pada saat harga garam melonjak tinggi. Namun, terdapat beberapa kendala seperti standar pemasaran, ijin, hingga program yang bersinggungan dengan tugas dan fungsi OPD lain. Sehingga program ini tetap dilaksanakan tapi produksi garam yang dihasilkan tidak dipergunakan untuk di proses ke pabrik garam namun hanya dipasarkan sebagai souvenir di wisata garam Kabupaten Pamekasan.
- d. Pelatihan dengan Kabupaten Banyuwangi mengenai proses iodinisasi garam serta pengemasan secara daring yang diikuti oleh 50 orang petambak garam selama 2 hari di Dinas Kelautan dan Perikanan.

Program PUGAR dalam meningkatkan produksi garam melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini telah dilakukan kelanjutan dan peneparan dari hasil pelatihan yang diberikan, teknologi yang telah dilakukan yaitu teknologi Geomembran dan Teknologi Ulir Filter (TUF) (Nazizah & Sustiyana, 2022). Teknologi Geomembran pertama kali diterapkan di Desa Galis, sedangkan Teknologi Ulir Filter (TUF) diterapkan pertama kali di Desa Majungan. Walaupun dalam proses penerapan teknologi baru ini mendapatkln kendala dimana sulitnya mendapatkan kelompok petani garam yang bersedia menerapkan teknologi baru. Namun, seiring berjalannya waktu pelatihan dan penerapan teknologi tersebut menunjukkan bahwa teknologi Geomembran lebih cocok diterapkan di Kabupaten Pamekasan. Sehingga pada tahun 2015, dibagikan bantuan sejumlah 2.400 roll Geomembran dan pada 2016-2017 masyarakat sudah mulai bersedia untuk membeli sendiri alat tersebut untuk diterapkan secara mandiri.

Kedua, pada aspek Sumber Daya Finansial, program ini dilakukan melalui bantuan akses permodalan dan pemasaran garam. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Bapak Beno sebagai berikut:

“Pemerintah melalui program PUGAR telah mampu menangani kendala petani garam seperti kurangnya modal, keterbatasan teknologi serta rendahnya keterampilan dan usaha tenaga kerja melalui berbagai kegiatan, seperti pemberian bantuan modal yang berkisar antara 50-75 juta per kelompok petambak garam, bantuan dan pelatihan penggunaan teknologi baru serta konsep corporate dan integrasi lahan hingga pelatihan proses ionisasi dan pengemasan. (Pak Beno, Dinas Kelautan Kabupaten Pamekasan).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa manfaat PUGAR mampu membantu masalah masyarakat dalam akses pemodal dengan adanya anggaran bantuan modal yang berkisar antara 50-75 juta per kelompok petambak garam. Selain itu para petani tambak juga dapat meminjam modal untuk perbaikan baik sarana prasarana dalam produksi garam maupun hal lainnya dengan bunga yang rendah. hal ini dapat memutuskan mata rantai tengkulak yang sebelumnya masyarakat menggunakan jasa tengkulak dalam bantuan pinjaman, dikarenakan bunga yang rendah namun kerugiannya adalah dengan dipotongnya harga jual garam/kg. Dalam bidang pemasaran dengan adanya program PUGAR ini para petani garam diberikan arahan serta saran dalam melakukan transaksi kepada tengkulak seperti harga dari masing-masing tengkulak dengan perbedaan harga yang ditawarkan pada pegaram sehingga dalam pemasarannya pegaram dapat memilih tengkulak yang memberikan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tengkulak lainnya. Namun dalam hal pemasaran kepada industri petani garam di Kabupaten Pamekasan belum dapat masuk dalam pasar industri.

Pemasaran hasil petani tambak di Kabupaten Pamekasan sejauh ini pemasaran hasil produksi garam masih bertahan dalam skala pasar lokal dan belum memiliki pasar industri yang tetap. Oleh karena itu pihak pemerintah yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) juga menjalankan program pendampingan secara berkala yaitu 1) identifikasi kebutuhan, 2) Pengukuran lahan, 3) Pengukuran jalan kontruksi yang akan dibangun, dan 4) Identifikasi GGR (Gudang Garam Rakyat). mengembangkan tata kelola pemasaran hasil produksi garam secara lebih optimal sehingga dapat meningkatkan daya saing garam lokal di pasar yang lebih luas, termasuk pasar industri. Program pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan petani tambak garam dapat diakomodasi dengan baik, mulai dari proses produksi hingga distribusi.

Disposisi

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan inisiatif yang dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam di Indonesia. Program ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan telah dijalankan dengan memprioritaskan realisasi yang cepat kepada petani garam yang menjadi sasaran. Disposisi pelaksanaan program dilakukan melalui mekanisme pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Koordinasi teknis dalam pelaksanaan program ini kemudian dilakukan dengan Dinas Kabupaten Pamekasan.

Dalam pelaksanaan kebijakan, sikap atau disposisi implementator dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu: (a) respon implementator terhadap kebijakan, yang mencerminkan kesediaan mereka untuk menjalankan kebijakan publik; (b) pemahaman terhadap kebijakan yang telah dirumuskan, yang menggambarkan kondisi kesiapan mereka; dan (c) intensitas disposisi, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh

implementator tersebut (Widodo, 2021).

Respon implementator terhadap kebijakan dalam program PUGAR menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Respons ini mencerminkan kesediaan dan komitmen para pelaksana program, seperti dinas terkait, pendamping lapangan, atau pihak yang terlibat secara langsung, dalam menjalankan kebijakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Kesediaan ini dapat dilihat dari upaya aktif mereka dalam memberikan dukungan, seperti pendampingan teknis, penyuluhan, dan pengawasan terhadap petani garam. Selain itu, pemahaman implementator mengenai kebijakan program PUGAR juga merupakan elemen penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi.

Pemahaman yang baik mencakup pengetahuan mengenai tujuan program, mekanisme pelaksanaan, prosedur administratif, dan strategi yang harus diterapkan untuk mendukung petani garam. Dengan pemahaman yang mendalam, implementator dapat memberikan arahan yang tepat, menyelesaikan kendala di lapangan, dan memastikan semua pihak yang terlibat memahami peran masing-masing. Di sisi lain, intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dipegang oleh pelaksana program, turut memengaruhi keberhasilan implementasi.

Nilai-nilai seperti kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan petani, dedikasi terhadap keberhasilan program, serta komitmen terhadap keberlanjutan ekonomi lokal memainkan peran penting dalam proses implementasi. Implementator dengan intensitas disposisi yang tinggi cenderung lebih berdedikasi dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi petani garam. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan secara bersama-sama menentukan efektivitas pelaksanaan program PUGAR di lapangan.

Langkah selanjutnya dalam implementasi PUGAR adalah melakukan pemberdayaan kepada masing-masing kelompok tani garam yang telah dibentuk. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti penyediaan sumber daya, pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani garam. Melalui pendekatan ini, diharapkan petani garam dapat mengoptimalkan usaha mereka secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi lokal serta kesejahteraan masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor garam.

Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) adalah sebuah entitas yang terdiri dari sepuluh petani garam yang telah membentuk struktur organisasi di dalam masing-masing kelompoknya. Persyaratan untuk menjadi anggota KUGAR mengharuskan individu tersebut memiliki latar belakang sebagai petani garam yang aktif, yang berarti mereka secara aktif terlibat dalam kegiatan produksi garam. Rekomendasi yang diberikan oleh dinas terkait menetapkan dua persyaratan utama. Pertama, calon anggota KUGAR harus memiliki kediaman di wilayah setempat atau desa yang sama. Jika terdapat calon anggota yang berasal dari luar desa, mereka diharuskan untuk menyusun surat pernyataan dan menyelenggarakan pertemuan resmi dengan kepala desa untuk mendapatkan persetujuan. Kedua, mereka harus memiliki akses ke lahan kerja yang digunakan untuk produksi garam, baik sebagai pemilik langsung, mitra dalam sistem bagi hasil, atau melalui sewa lahan. Bukti-bukti yang diterima termasuk surat sewa, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), akta jual beli, sertifikat kepemilikan lahan, dan keterangan resmi tentang sistem bagi hasil yang digunakan. Jika satu atau lebih dari persyaratan tersebut

terpenuhi, maka individu tersebut memenuhi syarat untuk menjadi anggota KUGAR, tanpa memandang jenis kelamin.

Program pemberdayaan ini terdiri dari lima kegiatan pokok. Yang pertama adalah penyelenggaraan pertemuan rutin anggota, disertai dengan upaya penyempurnaan administrasi, penyuluhan, pelatihan teknis, dan pemberian bantuan program. Tujuan utama dari serangkaian kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas petani garam dalam proses produksi garam, dengan harapan dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil produksi garam, tetapi juga pada penguatan kelembagaan petani garam, pengelolaan usaha yang lebih baik, dan keberlanjutan ekonomi mereka. Penyelenggaraan pertemuan rutin bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif antaranggota, menyelesaikan permasalahan secara kolektif, dan menciptakan sinergi dalam kelompok.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan suatu pola hubungan yang teratur dalam suatu lembaga yang memainkan peran penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik (Iswanto, 2023). Dalam implementasi kebijakan pemberdayaan usaha garam rakyat di Pamekasan, koordinasi antara berbagai instansi menjadi hal yang sangat vital. Langkah awalnya melibatkan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan arahan serta sumber daya teknis yang diperlukan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pamekasan perlu menjalin komunikasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan dukungan teknis dan informasi yang relevan. Pada tingkat lokal, peran Dinas Perikanan Pamekasan sangat krusial dalam pelaksanaan kebijakan, dengan tanggung jawab mengoordinasikan kegiatan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi implementasi program. Selain itu, koordinasi dengan kelompok usaha petani garam rakyat menjadi fokus utama, di mana pemberian informasi, pelatihan, dan pendampingan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Sinergi antara berbagai pihak ini menjadi landasan utama dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Sitanggang yang menekankan pentingnya struktur birokrasi yang adaptif dan koordinatif dalam implementasi kebijakan publik (Fahlevi et al., 2023).

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam hal koordinasi antar instansi yang dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian oleh Friskilawati Purba menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dan komunikasi antar organisasi perangkat daerah dapat menjadi hambatan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi telah dirancang untuk mendukung implementasi kebijakan, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan upaya perbaikan dalam hal koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian dari Umasugi, yang menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan (Umasugi, 2025).

Pembahasan

Implementasi kebijakan PUGAR di Kabupaten Pamekasan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani garam melalui pembentukan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Program ini dimulai pada tahun 2011 dengan fokus pada pengorganisasian pelaku produksi garam guna mengatasi kelemahan individu maupun kelompok dalam aspek akses, modal, keterampilan, dan pengetahuan tenaga kerja.

Dalam aspek komunikasi, hubungan antara pelaksana program PUGAR dengan pihak terkait, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan, serta petambak garam, telah terjalin dengan baik melalui sosialisasi, pemberdayaan langsung, pertemuan desa, dan diskusi di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan. Distribusi produk garam dilakukan melalui saluran langsung dan tidak langsung, dengan sebagian kecil petani garam menggunakan distribusi langsung karena keterbatasan modal dan pelanggan, sementara sebagian besar menggunakan distribusi tidak langsung melalui tengkulak, pengepul pabrik, dan pedagang kecil. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Rahmayani yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani garam melalui Program PUGAR (Alfiana Duwi Rahmayani, 2024; Iswanto, 2024).

Dalam aspek sumber daya, program PUGAR meningkatkan produksi garam melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi seperti Geomembran dan Teknologi Ulir Filter (TUF). Pelatihan lainnya meliputi konsep corporate dan integrasi lahan, re-kristalisasi garam, serta proses iodinisasi dan pengemasan. Program ini juga memberikan bantuan modal antara 50-75 juta rupiah per kelompok petambak garam dan memfasilitasi akses permodalan dengan bunga rendah, sehingga mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Namun, pemasaran hasil produksi garam masih terbatas pada pasar lokal dan belum menembus pasar industri secara signifikan. Hasil ini sesuai dengan temuan oleh Setiani, yang menyatakan bahwa bantuan teknologi dan modal dalam Program PUGAR meningkatkan produksi garam, meskipun pemasaran masih menjadi tantangan (Herawati, 2023a).

Dalam aspek disposisi, implementasi program PUGAR menunjukkan respons positif dari pelaksana program, termasuk dinas terkait dan pendamping lapangan, yang aktif memberikan dukungan teknis, penyuluhan, dan pengawasan kepada petani garam. Pemahaman yang baik terhadap tujuan program dan mekanisme pelaksanaan memungkinkan implementator memberikan arahan yang tepat dan menyelesaikan kendala di lapangan. Nilai-nilai seperti kepedulian terhadap kesejahteraan petani dan dedikasi terhadap keberhasilan program turut memengaruhi efektivitas implementasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Rindayani (2020), yang menekankan pentingnya disposisi positif dari implementator dalam keberhasilan Program PUGAR.

Dalam aspek struktur birokrasi, koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Koordinasi ini mencakup pemberian informasi, pelatihan, dan pendampingan kepada kelompok usaha petani garam rakyat, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Sinergi antara berbagai pihak ini menjadi landasan utama dalam mencapai

keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan usaha garam rakyat di Kabupaten Pamekasan. Hasil ini sesuai dengan penelitian oleh Wismanu et al. (2021), yang menyoroti pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemberdayaan petani garam (Wismanu et al., 2023).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Kabupaten Pamekasan telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi petani garam di wilayah tersebut. Dengan fokus utama pada pembentukan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), program ini berhasil mengurangi kelemahan yang dialami baik secara individu maupun kelompok oleh para petani. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III menunjukkan bahwa aspek komunikasi antara implementor program PUGAR dengan pihak terkait, seperti petani garam, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan, telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari upaya sosialisasi, pertemuan rutin, dan pembinaan langsung kepada petani garam serta pihak terkait lainnya.

Sumber daya, baik manusia maupun finansial, memegang peranan penting dalam keberhasilan program ini. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan, pengetahuan dan keterampilan petani garam dalam teknologi produksi garam telah meningkat secara signifikan. Selain itu, bantuan modal dan akses pembiayaan juga memberikan dorongan besar bagi petani garam untuk meningkatkan produksi dan pemasaran garam mereka. Disposisi yang kuat dari pihak terkait, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga pemerintah daerah, serta sinergi antara berbagai instansi pemerintah dan kelompok usaha petani garam rakyat, menjadi kunci dalam menjalankan program PUGAR dengan efektif.

Saran

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya terus meningkatkan komunikasi antara pihak terkait, serta memperkuat pendekatan pelatihan dan pendampingan untuk memastikan petani garam dapat mengoptimalkan potensi produksi mereka. Selain itu, perlu ditingkatkan pula koordinasi antara instansi terkait untuk memastikan kelancaran implementasi program ini secara berkelanjutan

Referensi

- Alfiana Duwi Rahmayani. (2024). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Garam di Kabupaten Pamekasan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 291-298. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1665>
- Edwards III, G. C., Mayer, K. R., & Wayne, S. J. (2024). *Presidential leadership: Politics and policy making*. Bloomsbury Publishing PLC.
- Fahlevi, M. R., Nuriah, A., Sinurat, T. A., Sitanggang, A. T., Purba, F., Pakpahan, Y. R., Silaen, T. N. E., & Ivanna, J. (2023). Implementasi Pelayanan Publik Birokrasi Di Indonesia. *Journal of Law & Policy Review*, 1(1), 33-44.
- Fauzan, E. M., Yulianingsih, I., & Azizah, A. (2020). Konstitusionalitas Perlindungan Petambak Garam Melalui Regulasi Daerah. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 10(1), 77-90.
- Gazali, M. M. (2019). *Mengungkap etos kerja petani garam di Madura*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hanik, U., & Mutmainah, M. (2020). Analisis Kinerja dan Kebutuhan Petani Garam di Kabupaten Pamekasan Sebagai Dasar Pengembangan Desain Model Social Learning. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 15(2), 237. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v15i2.7842>
- Heliani, L. S., Isnansetyo, A., & Widhyharto, R. D. S. (2024). *Tata Kelola dan Sosial Ekonomi Budaya Garam Rakyat*. UGM PRESS.
- Herawati, N. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Di Kabupaten Pati Tahun 2020-2022. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), 301-315.
- Husein, M. B., Wandu, M., Ma'mun, S., & Fachrizi, A. R. (2022). Empowerment Of Salt Farmers Through The People's Salt Business Empowerment Program (PUGAR) In Lembung Village, Galis District, Pamekasan Regency. *Dia*, 20(01), 181-192. <https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.6137>
- Iswanto, D. (2021). Realizing Inclusive Public Services: "Lapo Bra" Innovation in Building a Literacy Culture for Persons with Disabilities in Malang. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, & Social Inclusion's Studies*, 4(1), 71-80. <https://doi.org/10.36625/sj.v4i2.87>
- Iswanto, D. (2023). Analisis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 Dalam Perspektif Evidence Based Policy. *Jurnal Inovasi Daerah*, 2(2), 167-178. <https://doi.org/10.56655/jid.v2i2.134>
- Iswanto, D. (2024). Dampak Kebijakan Pembangunan Plaza Ikan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Tuban. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 14(2). <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/270>
- Katherin (2024). 5 Provinsi dengan Produksi Garam Terbanyak di Indonesia 2023. Goodstats. <https://data.goodstats.id/statistic/5-provinsi-dengan-produksi-garam-terbanyak-di-indonesia-2023-WyCzQ?utm>
- Knaap, G. J. (1991). A Forgotten Trade Salt in Southeast Asia 1670-1813.
- Kuncoro, R. D., Soemarno, S., & Kurniawan, A. (2023). Dampak Kegiatan Integrasi Pegaraman Terhadap Kegiatan Pegaraman di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(1), 36-42. <https://doi.org/10.14710/jil.21.1.36-42>

- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy implementation analysis: exploration of george edward iii, marilee s grindle, and mazmanian and sabatier theories in the policy analysis triangle framework. *JPAS (Journal of Public Administration Studies)*, 5(1), 33-38.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 126-138.
- Nazizah, F., & Sustiyana. (2022). Analisis Tingkat Pendapatan Petani Garam yang Menggunakan Geomembran di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Jurnal AgroSainTa: Widyaaiswara Mandiri Membangun Bangsa*, 6(1), 21-28. <https://doi.org/10.51589/ags.v6i1.89>
- Nugroho, P., Susandini, A., & Islam, D. (2020). Mengkaji sistem pemasaran garam di Madura. *Media Trend*, 15(1).
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (2019). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan 2018-2023.
- Permodo, R. A., & Rochwulaningsih, Y. (2022). Problematika Usaha Garam: Tantangan dan Peluang Petani Garam di Desa Jono, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. *Jurnal Historiografi*, 3(1), 76-84.
- Rintiyani, R., Syafriyani, I., & Yulastina, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam Untuk Kesejahteraan Ekonomi (Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep). *Public Corner*, 17(1). <http://www.sumenepkab.go.id>
- Rochwulaningsih, Y. (2007). Petani garam dalam jeratan kapitalisme: analisis kasus petani garam di rembang, jawa tengah. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 20(3).
- Sari, Y. R. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2011-2013. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 17. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22894>
- Susandini, A., & Jannah, M. (2021). Tingkat Pendapatan, Pola Konsumsi, Dan Pola Menabung Petani Garam Dalam Personal Finance. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 11(1), 11-27. <https://doi.org/10.24929/feb.v11i1.1321>
- Syakatera, J., & Purnomo, A. S. D. (2022). Peran LKM Sebagai Sarana Input Produksi Garam dan Tenaga Kerja Dalam Usaha Tambak Garam Madura. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM)*, 2(4). <https://doi.org/10.21107/jkim.v2i4.18413>
- Umasugi, M. (2025). Bureaucratic Reform and Public Policy Dynamics: Evaluation Study of One Data Indonesia Program. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 4(1), 01-21. <https://doi.org/10.55299/ijcs.v4i1.1279>
- Wanta, K. C., Santoso, H., Miryanti, A., & Witono, J. R. B. (2023). Peningkatan Kesejahteraan Petani Garam Desa Olio, Provinsi NTT Melalui Pelatihan Pembuatan Garam Konsumsi Beryodium. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 253-264. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v4i1.2381>
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Wismanu, R. E., Prakasa, Y., Wahyudi, L. E., & Nashihah, D. (2023). Stakeholders collaboration to stimulate the economic empowerment for salt farmers in pamekasan regency. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 18(1), 65-74.